

**EVALUASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM
MEMBERDAYAKAN PENYANDANG DISABILITAS KOTA PEKANBARU**

Maulani Azmi Widiyanti

Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Maulaniwidya23@gmail.com

Abstract

The Social Service has a big role in encouraging the realization of welfare for people with disabilities. By empowering people with disabilities, they will be able to have a significant impact on people with disabilities. However, in the empowerment carried out, evaluations need to be carried out to assess the performance of social services. This research uses a qualitative descriptive method with data obtained through observation, interviews and documentation. The results of this research are known, based on five indicators, that the indicators of enabling, strengthening, supporting and maintaining have been implemented quite well by the Pekanbaru City Social Service. Meanwhile, the indicator that is lacking in empowerment is protection. From this research, it was also found that factors inhibiting the empowerment of people with disabilities include limited budgets, lack of socialization, resistance from people with disabilities, and a lack of accompanying staff in implementing the program.

Keyword: Social Service, Empowerment, Disability

Abstrak

Dinas Sosial memiliki peranan besar dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Melalui pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas akan mampu memberikan dampak signifikan bagi para disabilitas. Namun, dalam pemberdayaan yang dilakukan perlu dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja dinas sosial. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini, berdasarkan lima indikator pemberdayaan diketahui bahwa indikator pemungkinan, penguatan, penyokong dan pemeliharaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru. Sedangkan indikator yang kurang dalam pemberdayaan adalah perlindungan. Dari penelitian ini ditemukan juga faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas diantaranya yaitu anggaran yang terbatas, kurangnya sosialisasi, adanya penolakan dari penyandang disabilitas, serta minimnya tenaga pendamping dalam melaksanakan program

Kata kunci: Dinas Sosial, Pemberdayaan, Disabilitas.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini dijelaskan dalam tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pasal-pasal yang bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui azas-azas umum pemerintah daerah yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam tugas pembantuan, terdapat urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota salah satunya ialah urusan pemerintah konkruen berupa kewajiban berkaitan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta sosial. Bukan hanya itu, ada pula kewajiban yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berupa tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan, pangan, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemerintah daerah diketahui memiliki fungsi-fungsi utama berupa pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan harusnya mampu memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang

disabilitas melalui lembaga dinas sosial dengan menerapkan program-program yang berkualitas dan efektif. Dinas Sosial adalah dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat gelandangan pengemis, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Penyandang cacat atau disabilitas terdiri dari 2 kelompok, antara lain sebagai berikut:

1. Penyandang cacat fisik, meliputi:
 - a. Penyandang cacat tubuh (tuna daksa).
 - b. Penyandang cacat netra (tunanetra).
 - c. Penyandang cacat tuna wicara/rungu.
 - d. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis).
2. Penyandang cacat mental, meliputi:
 - a. Penyandang cacat mental (tuna grahita).
 - b. Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras).

Tabel I.1 Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JK	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS GANDA	DISABILITAS INTELEKTUAL	DISABILITAS MENTAL	DISABILITAS SENSORIK	TOTAL
1	BINAWIDYA	L	14	7	4	5	8	38
	BINAWIDYA	P	8	7	5	5	4	29
2	BUKIT RAYA	L	12	11	7	13	12	56
	BUKIT RAYA	P	9	10	3	15	14	51
3	KULIM	L	7	4	0	3	1	15
	KULIM	P	6	1	1	0	1	9
4	LIMA PULUH	L	8	7	8	6	4	33
	LIMA PULUH	P	6	6	4	5	4	25
5	MARPOYAN DAMAI	L	18	17	13	21	9	78
	MARPOYAN DAMAI	P	17	17	5	0	8	47

6	PAYUNG SEKAKI	L	9	6	1	9	2	27
	PAYUNG SEKAKI	P	9	2	0	7	1	19
7	PEKANBARU KOTA	L	5	11	7	4	4	31
	PEKANBARU KOTA	P	7	3	6	2	7	25
8	RUMBAI	L	17	10	0	24	7	58
	RUMBAI	P	21	9	7	10	4	51
9	RUMBAI BARAT	L	6	4	4	4	2	20
	RUMBAI BARAT	P	-	1	4	2	1	8
10	RUMBAI TIMUR	L	11	5	3	18	3	40
	RUMBAI TIMUR	P	5	4	3	2	1	15
11	SAIL	L	8	6	4	2	5	25
	SAIL	P	3	3	0	2	2	10
12	SENAPELAN	L	15	6	3	9	2	35
	SENAPELAN	P	6	7	1	10	1	25
13	SUKAJADI	L	6	10	10	8	3	37
	SUKAJADI	P	4	6	7	7	2	26
14	TENAYAN RAYA	L	29	12	1	24	6	72
	TENAYAN RAYA	P	29	17	14	12	8	80
15	TUAHMADANI	L	17	8	3	4	6	38
	TUAHMADANI	P	15	6	3	2	7	33
TOTAL								1056

Berdasarkan tabel diatas, dari 15 kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru jumlah penyandang disabilitas adalah 1056 orang pada tahun 2023. Dimana jumlah penyandang disabilitas terbesar berada di Kecamatan Tenayan Raya. Dengan angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi di Kota Pekanbaru maka hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Pekanbaru khususnya bagi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan cara memberikan perlindungan, pemberdayaan maupun bantuan-

bantuan khusus terhadap para penyandang disabilitas untuk menunjang kehidupan mereka.

Tabel I.2 Rekapitulasi Penerima Manfaat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Kecamatan	Orang dengan kedisabilitasana
1	Binawidya	11
2	Bukit Raya	21
3	Kulim	6
4	Lima Puluh	7
5	Payung Sekaki	14
6	Marpoyan Damai	22
7	Pekanbaru Kota	4
8	Rumbai	12
9	Rumbai Barat	4
10	Rumbai Timur	0
11	Sail	1
12	Senapelan	4
13	Sukajadi	2
14	Tenayan Raya	4
15	Tuah Madani	14
Jumlah		126

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat 126 orang kedisabilitasana yang telah mendapatkan Penerima Manfaat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS). PPKS ini di dalamnya terdapat bantuan sosial dan rehabilitasi sosial termasuk rehabilitasi pelatihan. Program rehabilitasi pelatihan yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pemakamana Kota Pekanbaru adalah pelatihan keterampilan merajut, menjahit, dan memangkas rambut. Dalam pemberdayaan ini penyandang disabilitas diharapkan tidak lagi ketergantungan dengan lingkungannya dan diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat para penyandang disabilitas ini menjadi produktif dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Rehabilitasi pelatihan penyandang disabilitas ini dilakukan di rumah shelter milik Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Melihat peran dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas harus terus dievaluasi agar program yang dijalankan memiliki dampak yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan beberapa fenomena seperti halnya fasilitas khusus disabilitas seperti garis penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas yang mengalami kebutaan, toilet khusus disabilitas, kursi khusus disabilitas, parkir khusus disabilitas, dan fasilitas lainnya, yang kenyataannya (fasilitas, pelayanan sosial dan mobilitas bagi penyandang disabilitas) ini masih sangat kurang. Tidak hanya itu, masih banyak ditemukan penyandang disabilitas yang memanfaatkan keadaannya untuk menjadi pengemis di jalanan, khususnya lampu merah dan tempat umum lainnya. Selain itu, minimnya sosialisasi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang perlindungan, rehabilitasi sosial/pemberdayaan, serta bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup bagi para penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.

Berlandaskan pernyataan-pernyataan di atas, maka penting untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru mengambil peran dalam melakukan pemberdayaan, program-program apa saja yang akan dilakukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam melakukan pemberdayaan. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesejahteraan serta berjalannya fungsi dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru secara efektif dan efisien.

LANDASAN TEORITIS

Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah adalah alat yang dimiliki negara yang terdiri dari lembaga-lembaga kenegaraan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.¹ Sedangkan menurut Dharma Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan sah oleh rakyatnya untuk melaksanakan pengaturan terhadap kehidupan masyarakat interaksi dalam pergaulan masyarakat (baik pemerintah dengan pemerintah, kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, serta kelompok dan individu) dengan tujuan untuk memenuhi keperluan dan kehidupan masyarakatnya sehari-hari, sehingga interaksi yang diatur tersebut berjalan dengan harmonis.

¹ Muhadam Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.34.

Menurut Erliana Hasan pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberi tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.² Definisi lain disampaikan Soemedar bahwa pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semesttinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan rakyat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.³

Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban bagi daerah yang telah diberikan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan,serta kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

² Erliana Hasan. *Komunikasi Pemerintahan Edisi 2*. (Yogyakarta: Refika Aditama, 2023), hal.6

³ Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal.11

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom agar melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Konsep Ilmu Pemerintahan

Ndraha mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.⁴ Lalu Gaffar juga mengungkapkan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sekelompok masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Poeljie menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mengajarkan dinas disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.⁵ Sedangkan menurut Syafie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dan yang diperintah.⁶

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi. Kebijakan publik menurut Dye (1978) dalam *Understanding Public Policy* adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

⁴ Thaliziduhu Ndraha. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. (Jakarta, PT. Renika Cipta, 2015), hal.8

⁵ Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal.32

⁶ Inu Kencana Syafie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Refika Aditama, 2020), hal.8

Kebijakan publik menurut Prewitt sebagai suatu bentuk keputusan dengan bercirikan konsistensi dan repetisi mengenai tingkah laku mereka sebagai perumus, pembuat, dan pengesahan keputusan yang ditetapkan. Ndraha menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.⁷

Dari beberapa pernyataan diatas maka disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan acra melakukan aktivitas dan membuat keputusan secara bersama dan dilaksanakan oleh pemerintah demi menyelesaikan masalah internal dan eksternal negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Konsep Evaluasi

Secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assasement) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditemukan dapat dicapai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah pemrograman diberhentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau diingatkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan, maka terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur, antara lain⁸:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas

⁷ Thaliziduhu Ndraha. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2015), hal.98

⁸ William N Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal.429-499

6. Ketepatan

Berdasarkan pendapat Dunn diatas dapat disimpulkan evaluasi adalah suatu proses kebijakan yang penting karena dengan evaluasi dapat diketahui nilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan melalui tindakan publik, diaman tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga lepentasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau melaukan revisi pada kebijakan

Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata ‘power’ yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Edi Suharto Pemberdayaan mengacu pada kapasitas setiap orang, memfokuskan masyarakat rentan dan lemah sehingga masyarakat terdapat hak istimewa artinya, tidak hanya bebas menyampaikan pendapat tetapi bebas juga dari kelaparan dan kesakitan. Pemberdayaan mencapai sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapat serta memperoleh barang yang mereka butuhkan dan berkontribusi pada konteks pembangunan keputusan yang mempengaruhi mereka. Sehingga, dalam hal ini Edi Suharto menyimpulkan beberapa indikator keberdayaan masyarakat diantaranya kekuasaan dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with).⁹

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.

⁹ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial Edisi 5*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dalam menerapkan pemberdayaan, Suharto memiliki pendekatan yang dikenal dengan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan¹⁰.

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

¹⁰ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial Edisi 5*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Konsep Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan. Adapun jenis penyandang disabilitas diantaranya Buta (Tuna Netra), Tuli (Tuna Rungu), Bisu (Tuna Wicara), Cacat Fisik (Tuna Daksa), Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita), Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras), dan Cacat Kombinasi (Tuna Ganda).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nanang Martono penelitian kualitatif adalah data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen -dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.¹¹

Dalam penelitian akan dilakukan deskripsi atas gambaran fenomena-fenomena yang dijumpai pada lokasi penelitian secara objektif, spesifik, transparan dan mendalam sesuai dengan yang didapatkan serta masalah pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Selain itu, Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan informan dan key informan untuk mendapatkan keterangan mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Key informan	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
3	Informan	Pegawai bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	1

¹¹ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 32*. (Bandung: PT. Rineka Rosda Karya, 2014).

4	Informan	Penyandang Disabilitas yang belum/sedang direhabilitasi	3
5	Informan	Penyandang Disabilitas yang telah di rehabilitasi	1

Sumber: Olahan Data Penulis, 2024

Key informan menurut Moleong (2005:3) yaitu orang yang tidak hanya dapat memberikan informasi tetapi juga memberikan tentang sumber bukti mendukung mengenai penelitian kepada penulis.¹² Sedangkan Informan menurut Moleong (2017:132) merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sehingga informasi yang didapatkan jelas, akurat, dan terpercaya baik pernyataannya, keterangan, maupun data-data yang bisa membantu peneliti dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.¹³

Metode pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian hal-hal yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan analisis dengan perbandingan terhadap teori yang relevan, selanjutnya dijabarkan secara deskriptif dan diambil kesimpulannya. Penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pemberdayaan, hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial adalah hak dari penyandang disabilitas. Pemberdayaan juga harus sesuai dengan visi dan misi yang ada. Dalam melaksanakan pemberdayaan, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan pemberdayaan yang dikenalkan oleh Suharto. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan dari narasumber sebagai berikut: .

¹² Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Rineka Rosda Karya, 2017), hal.3

¹³ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Rineka Rosda Karya, 2017), hal.132

Pemungkinan

Pemungkinan ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.

Indikator pemungkinan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Berkaitan dengan Evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas akan mengedepankan tindakan berupa menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas serta menciptakan keadaan yang memungkinkan pelaksanaan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Adriyani, SH. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial diketahui bahwa Dinas Sosial sudah berupaya memberikan fasilitas yang terbaik demi kenyamanan para penyandang disabilitas yang akan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Selain itu, Ibu Hanum Hasmarlin yang merupakan staff bidang rehabilitasi sosial menambahkan bahwa Dinas Sosial telah menyediakan berbagai macam pelatihan dan bantuan yang di khusus kan untuk masyarakat penyandang disabilitas untuk membantu dan menunjang kehidupan sosial penyandang disabilitas.

Dalam wawancara lainnya, dari pihak penyandang disabilitas yaitu Pak Danang menyampaikan bahwa beliau telah mendapatkan pelatihan, bantuan kursi roda dan bantuan wirausaha oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Selain Pak Danang, Putra yang juga penyandang disabilitas juga diketahui pernah mengikuti pendidikan pijat dari dinas sosial di rumah shelter, dan tempanya sangat nyaman. Akan tetapi, disisi lain diperoleh pengakuan berbeda dari penyandang disabilitas lain yaitu Pak Yoyok yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah mendapatkan pelatihan maupun bantuan lainnya dari dinas sosial. Informasi mengenai hal tersebut tidak diperoleh pak Yoyok karena beliau juga sibuk bekerja berjualan kue dan koran.

Dari beberapa wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas nya secara optimal yang dimaksud dalam indikator pemungkinan ini, yang diartikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan fasilitas tempat pelatihan yang baik dan nyaman untuk mendukung kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar terlaksana dengan efektif dan

menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat penyandang disabilitas.

Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.

Dalam aspek penguatan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menyediakan program pelatihan, bantuan sosial, dan dukungan sosial. Hal ini dijelaskan oleh ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa untuk penguatan fisik dan mental, dinas sosial menyediakan pelatihan seperti pelatihan tata boga, membatik, kerajinan tangan, pijat dan lain sebagainya. Ibu Hanum Harmalin menambahkan bahwa selain pelatihan Dinas Sosial juga memberikan dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping resos (rehabilitasi sosial) dengan cara memberikan motivasi-motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat penyandang disabilitas. Dinas juga memberikan bantuan wirausaha kepada keluarga penyandang disabilitas untuk menunjang perekonomian mereka.

Berdasarkan program yang dibuat Dinas Sosial, para penyandang disabilitas seperti Putra dan Pak Danang mengatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Sehingga, dalam aspek penguatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan berbagai macam bentuk pelatihan, bantuan, dan dukungan sosial untuk menunjang kehidupan mereka, meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat penyandang disabilitas.

Perlindungan

Indikator perlindungan ini menilai bagaimana tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melindungi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat penyandang disabilitas yang merupakan kaum minoritas. Mengenai perlindungan yang diberikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada penyandang disabilitas dijelaskan oleh Ibu Adriyani selaku kepala bidang rehabilitasi sosial bahwa regulasi terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas baru ada pada tingkat provinsi, sedangkan regulasi perlindungan

hak penyandang disabilitas untuk tingkat Kota di tahun 2024 sedang dilakukan pembahasan. Selain itu, Ibu Hanum Hasmarlin menyatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan dinas untuk memberikan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah memberikan jaminan kesehatan melalui program KIS (Kartu Indonesia Sehat). Karena penyandang disabilitas juga berhak mendapat jaminan kesehatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun dalam wawancara terhadap penyandang disabilitas yaitu Pak Yoyok dan Putra, diketahui bahwa mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan berupa KIS, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang program jaminan kesehatan KIS. Di lain sisi, Pak Danang yang juga merupakan penyandang disabilitas menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan KIS.

Dalam beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial belum optimal karena belum ada regulasi tentang perlindungan hak penyandang disabilitas pada tingkat Kota sedangkan perlindungan seperti jaminan kesehatan KIS masih ada masyarakat penyandang disabilitas yang tidak memilikinya karena ketidaktahuan mereka dan kurangnya sosialisasi dari dinas sosial mengenai jaminan kesehatan ini.

Penyokong

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Dinas sosial kota Pekanbaru telah memberikan dukungan fisik dan mental secara optimal dengan memberikan pelatihan, bantuan, vitamin, dan motivasi. Tidak hanya itu, dinas sosial melibatkan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelatihan penyandang disabilitas. Pihak ketiga merupakan perseorangan yang menjadi relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Walaupun demikian, dinas sosial masih kurang optimal dalam sosialisasi rehabilitasi pelatihan yang mereka sediakan untuk penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas sosial kota Pekanbaru.

Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu

menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Memelihara aksesibilitas fisik maupun non-fisik yang dimiliki untuk mendukung keberlangsungan hidup penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik seperti jalur pemandu untuk tuna netra, bidang miring (ramp) untuk penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda, penyediaan pegangan (handrail) pada tempat-tempat yang memang dibutuhkan, dan masih banyak lagi. Aksesibilitas non fisik berkaitan dengan pelayanan khusus yang diberikan untuk penyandang disabilitas mengingat kondisi mereka yang tidak sama seperti masyarakat awam.

Dinas sosial kota Pekanbaru telah menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk kenyamanan para penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik yang disediakan seperti bidang miring, toilet khusus penyandang disabilitas, tempat duduk khusus penyandang, dan parkir khusus penyandang disabilitas. Pemeliharaan aksesibilitas fisik umum akan dilakukan peninjauan setiap tahun akan diperbaiki apabila ada kerusakan dengan anggaran berikutnya. Sedangkan, aksesibilitas non fisik seperti pelayanan akan diperbaiki secara terus menerus dan dievaluasi pada rapat evaluasi kinerja untuk kemudahan akses pelayanan masyarakat penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik dan non fisik yang disediakan dinas sosial bertujuan agar penyandang disabilitas tidak lagi merasa menjadi kaum minoritas yang terpinggirkan karena sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menunjang kehidupan mereka

Faktor Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas, diantaranya:

- a. Anggaran pelatihan yang terbatas, membuat Dinas Sosial tidak bisa menyelenggarakan pelatihan bagi para penyandang disabilitas dengan jumlah banyak
- b. Tidak adanya sosialisasi tentang rehabilitasi pelatihan penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. Pelatihan tidak disosialisasikan secara umum. Dinas sosial akan mensosialisasikan program ini terhadap penyandang disabilitas yang telah terdata oleh dinas sosial dan dianggap layak untuk diberikan pelatihan atau dinas sosial akan melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas berdasarkan laporan dari PSM

- c. Selain faktor penghambat yang berasal dari dinas, ada juga faktor penghambat yang berasal dari penyandang disabilitas itu sendiri yaitu masih ada penyandang disabilitas yang menolak untuk mendapatkan pelatihan hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti penyandang disabilitas memang tidak berniat melakukan pelatihan, penyandang disabilitas lebih memilih untuk pergi bekerja dan penyandang disabilitas hanya ingin mendapatkan bantuan ekonomi saja. Faktor penghambat yang berasal dari penyandang disabilitas ini sulit untuk diatasi.
- d. Kurangnya tenaga pendamping rehabilitasi sosial. Minimnya tenaga pendamping mengakibatkan program-program yang dibentuk akan mengalami kendala sehingga sulit terealisasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yaitu diketahui bahwa berdasarkan beberapa indikator evaluasi dinas sosial kota Pekanbaru dalam memberdayakan penyandang disabilitas bahwa dari segi pemungkinan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas nya secara optimal yaitu dengan memberikan fasilitas tempat pelatihan yang baik dan nyaman untuk mendukung kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dilihat dari indikator Penguatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan berbagai macam bentuk pelatihan, bantuan, dan dukungan sosial untuk menunjang kehidupan mereka, meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat penyandang disabilitas. Indikator lain yaitu Penyokong, Dinas Sosial telah memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas baik secara fisik maupun mental dengan baik, karena pihak dinas sudah memberikan pelatihan, bantuan dana hingga memperhatikan kesehatan dengan pemberian vitamin. Dan untuk indikator Pemeliharaan juga sudah cukup baik karena akan terus dilakukan peninjauan berkala setiap tahunnya dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kerusakan atas fasilitas disabilitas.

Selain beberapa indikator yang sudah cukup baik terlaksana oleh Dinas Sosial, indikator Perlindungan Dinas Sosial kota Pekanbaru diketahui belum optimal karena belum ada regulasi tentang perlindungan hak penyandang disabilitas pada tingkat Kota sedangkan perlindungan seperti jaminan kesehatan KIS masih ada masyarakat

penyandang disabilitas yang tidak memilikinya karena ketidaktahuan mereka dan kurangnya sosialisasi dari dinas sosial mengenai jaminan kesehatan ini. Selain itu, Dinas sosial juga masih dianggap kurang optimal dalam sosialisasi rehabilitasi pelatihan yang mereka sediakan untuk penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas sosial kota Pekanbaru.

Melalui penelitian ini diketahui bahwa faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru diantaranya yaitu anggaran yang terbatas, kurangnya sosialisasi, adanya penolakan dari penyandang disabilitas, serta minimnya tenaga pendamping dalam melaksanakan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Amansyah, D. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. Skripsi Ilmu Pemerintahan.
- Baturangka, T., Kaawoan, J. ., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial Edisi 5*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Erliana Hasan. *Komunikasi Pemerintahan Edisi 2*. (Yogyakarta: Refika Aditama, 2023), hal.6
- Hayati, S. (2019). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BINJAI. 2, 1–13.
- Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal.11
- Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal.32
- Inu Kencana Syafii. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Refika Aditama, 2020), hal.8
- KURNIAWAN, A. F. (2022). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor http://repository.uin-suska.ac.id/57830/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/57830/2/SKRIPSI_AHMAD_FATHONI.pdf
- Kusumawati, C. ., & Winarni, F. (2009). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Sosial di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 4(2), 1–14.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 32*. (Bandung: PT. Rineka Rosda Karya, 2014).

- Muhadam Labolo. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.34.
- Pasciana, R. (2020). PELAYANAN PUBLIK INOVATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Di Kabupaten Garut). *Sawala Administrasi Negara*, 8(2), 192–204.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- ROFIQ, R. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru. Skripsi Ilmu Administrasi Negara
- Thaliziduhu Ndraha. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2015), hal.98
- William N Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal.429-499